

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Pada tatanan kehidupan bernegara, pemerintah merupakan penyelenggara negara yang bertugas untuk mengatur negara di berbagai bidang kehidupan, salah satunya dalam bidang perekonomian. Peran pemerintah juga dinilai semakin penting dalam perekonomian jika dikaitkan dengan pelaku-pelaku utama perekonomian lainnya. Perekonomian suatu negara tidak hanya dapat dijalankan oleh sektor swasta (rumah tangga, perusahaan, dan luar negeri) saja, tetapi perlu kerjasama dengan sektor pemerintah untuk menstabilkan perekonomian. Terdapat kegagalan pasar (*market failure*) yang terkait dengan barang publik menegaskan bahwa pemerintah memegang peran yang strategis dalam perekonomian sebagai penyedia dan pemelihara barang-barang publik. Guna menjalankan fungsi dan peran dalam perekonomian, pemerintah memerlukan dana.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> M.Imam Syairozi dan An'im Fatah, "Analisis Pajak dan Variabel Makroekonomi Terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan", *E-jurnal Seminar Nasional Sistem Informasi Fakultas Teknologi Informasi*, (September 2017).

Sebagai salah satu sumber penerimaan dalam negeri, penerimaan pajak berasal dari iuran wajib masyarakat yang dibayarkan kepada pemerintah dan pembebanannya berhubungan dengan aktivitas tertentu. Pajak juga dapat diartikan sebagai pengalihan sumber daya dari sektor privat kepada sektor pemerintahan. Sumber penerimaan dalam negeri lainnya adalah penerimaan bukan pajak yang merupakan penerimaan pemerintah yang diperoleh selain dari penerimaan pajak, seperti penerimaan yang berasal dari Sumber Daya Alam (SDA), penerimaan dari bagian keuntungan badan usaha atau perusahaan milik negara, dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) lainnya.<sup>2</sup>

Realisasi penerimaan pajak hingga Juli 2017 mencapai Rp. 601,1 triliun atau 46,8 persen dari target Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBNP) tahun anggaran 2017 yang sebesar Rp. 1,472,7 triliun.<sup>3</sup> Perkembangan penerimaan DJP periode 1 Januari sampai dengan 31 Juli 2017, total penerimaan DJP termasuk PPh migas sebesar Rp. 601,1 triliun," Kamis, 10

---

<sup>2</sup> Wijayanti, "Analisis Penerimaan Pajak Indonesia Pendekatan Ekonomi Makro (2004-2005)", (S.E, skripsi, Pada Program Sarjana Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro 2015), 10.

<sup>3</sup> Kementerian Keuangan, "Perbandingan Realisasi Dan Target Penerimaan Pajak", <http://www.kemenku.go.id> (Diunduh Pada Tanggal 1 Juli 2018).

Agustus 2017". Diluar PPh migas (minyak dan gas bumi), maka realisasi penerimaan sebesar Rp. 569,4 triliun atau 45,9 persen dari target APBNP 2017 dengan pertumbuhan 10,3 % Lalu, penerimaan PPh non migas sendiri sebesar Rp. 336,1 triliun atau 45,3 persen dari target APBNP 2017 dengan pertumbuhan 8,7 persen. Sedangkan penerimaan PPN dan PPnBM sebesar Rp. 228,7 triliun atau 48,1 persen dari target APBNP tahun ini dengan pertumbuhan 13,4 % untuk mengejar sisa penerimaan yang kurang sekitar 53,2 persen, memperlihatkan bahwa penerimaan pajak Indonesia pada tahun 2007 mencapai Rp. 491 triliun dengan kontribusi sebesar 70 persen dari total penerimaan dalam negeri, sedangkan sisanya berasal dari penerimaan bukan pajak dengan nilai sejumlah Rp. 215,1 triliun.

Sejalan dengan mode penerimaan pajak yang meningkat, kontribusi penerimaan pajak juga mengalami peningkatan pada tahun 2014. Penerimaan pajak mencapai angka Rp. 1,246,1 triliun dan berkontribusi sebesar 76 persen pada pendapatan dalam negeri, sedangkan pada tahun yang sama penerimaan bukan pajak hanya Rp. 386,9 triliun atau sebesar 24 persen dari pendapatan dalam negeri. Besarnya proporsi penerimaan pajak di Indonesia pada

periode 2007 hingga 2014 tersebut menunjukkan bahwa penerimaan pajak cenderung mengalami peningkatan dan memiliki peran yang besar bagi sumber penerimaan dalam negeri.<sup>4</sup>

Kebijakan fiskal dalam APBN tahun 2017 dibuat secara kredibel, efisien dan efektif serta berkesinambungan. Untuk mencapai tujuan tersebut, upaya mereformasi fiskal sudah digulirkan pemerintah sejak 2015 dalam kebijakan APBN. Dalam APBN 2017, pemerintah memastikan komitmennya untuk menjaga keberlanjutan reformasi struktural atas kebijakan APBN melalui tiga pilar utama salah satunya adalah optimalisasi pendapatan negara yang diarahkan pada perluasan basis pendapatan yaitu pajak, namun tetap selaras dengan kapasitas perekonomian agar tidak mengganggu iklim investasi.<sup>5</sup>

Dalam postur APBN 2017 ditetapkan jumlah pendapatan negara sebesar Rp. 1,750,3 triliun Jumlah ini terdiri dari penerimaan Pajak sebesar Rp. 1,489,9 triliun, Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebesar Rp. 250 triliun. Hal ini disusun dengan mempertimbangkan potensi perpajakan yang bisa diterima pemerintah pada

---

<sup>4</sup> Kementerian Keuangan, "*Pendapatan Negara*", <http://www.kemenku.go.id> (diunduh pada tanggal 1 Juni 2018).

<sup>5</sup> Kementerian keuangan, <https://www.kemenkeu.go.id/apbn2017>, (diunduh pada tanggal 1 Juni 2018).

2017 mendatang, termasuk realisasi program Amnesti Pajak dan penerimaan dari sumber-sumber pajak baru.

Menurut UU No.16 tahun 2009 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan: “Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”.

Dalam pelaksanaan pemenuhan kewajiban perpajakan telah terjadi perbedaan kepentingan antara wajib pajak dan pemerintah. Wajib pajak akan berusaha untuk menekan pembayaran pajaknya serendah mungkin, karena dengan membayar pajak berarti mengurangi kemampuannya, sedangkan pemerintah akan berusaha untuk menarik pajak semaksimal mungkin, karena untuk memutar roda pemerintahan diperlukan dana yang tidak sedikit dan pajak merupakan salah satu tumpuan pemerintah untuk memperoleh dana penyelenggaraan pemerintahan.

*Tax ratio* menjadi salah satu topik yang pertama dibahas apabila berbicara mengenai kinerja pemerintah, khususnya dalam hal penerimaan pajak. Sejumlah pengamat berpendapat bahwa

perbandingan antara penerimaan pajak dengan PDB di Indonesia masih sangat rendah. Pada tahun 2012, *tax ratio* di Indonesia adalah sebesar 11,9 %, dan dalam APBN tahun 2017 menurun menjadi sebesar 10,9 %. Dengan *tax ratio* yang berada pada kisaran 10 % tersebut, kinerja Pemerintah Indonesia dalam memungut pajak masih jauh lebih rendah dibandingkan dengan Negara-negara di Eropa seperti Jerman, Italia, Swedia dan Belanda yang memiliki rasio pajak berkisar antara 30% sampai dengan 50% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). Bahkan jika dibandingkan dengan Negara-negara di kawasan Asia (kecuali Filipina) dan Australia saja, rasio pajak di Indonesia masih lebih rendah.<sup>6</sup>

Analisis faktor tersebut menggunakan variabel-variabel yang berhubungan dengan dasar pengenaan pajak tersebut, seperti pendapatan perkapita sebagai dasar pajak penghasilan, rasio sektor pertambangan (minyak maupun non-minyak) terhadap PDB sebagai dasar pajak penghasilan migas, serta jumlah ekspor dan impor terhadap PDB sebagai dasar pajak perdagangan luar negeri, rasio sektor pertanian terhadap PDB. Variabel dasar pengenaan

---

<sup>6</sup> Kementerian keuangan, <https://www.kemenkeu.go.id/apbn>, 2017, (diunduh pada tanggal 1 Juni 2018).

pajak terhadap penerimaan pajak pada umumnya menunjukkan hubungan yang positif. Hal tersebut karena jika dasar pengenaan pajak mengalami peningkatan maka jumlah pajak yang dibayarkan akan meningkat, sehingga penerimaan pajak pemerintah juga akan meningkat.<sup>7</sup>

Selain variabel dasar pengenaan pajak, variabel kebijakan ekonomi makro juga memainkan peran penting dalam analisis penerimaan pajak. Variabel ekonomi makro, seperti Produk Domestik Bruto (pertumbuhan ekonomi) yang juga merupakan faktor tradisional, tingkat inflasi, dan nilai kurs, dinilai memiliki pengaruh terhadap penerimaan pajak.

Selain itu berdasarkan penelitian-penelitian yang dilakukan di beberapa negara ketidakseimbangan ekonomi makro dan tingkat aktivitas ekonomi merupakan faktor penggerak utama elastisitas pajak atau penerimaan pajak. Analisis faktor ekonomi makro juga merupakan hal yang penting dalam menyusun dan merencanakan penerimaan pajak.

Berdasarkan penjelasan dan bukti empiris di berbagai negara, maka analisis variabel-variabel ekonomi makro adalah penting

---

<sup>7</sup> Boediono, *Pengantar Ilmu Ekonomi No. 2 Ekonomi Makro Edisi 4*, (Yogyakarta: BPFY Yogyakarta, 2014), 159-167.

dalam menyusun dan merencanakan penerimaan pajak. Selain itu, analisis variabel ekonomi makro juga merupakan hal yang penting dalam mengoptimalkan penerimaan pajak guna mendanai belanja negara. Pengaruh dinamika variabel-variabel ekonomi makro terhadap penerimaan pajak dalam jangka panjang dan jangka pendek juga merupakan bagian yang krusial dalam menganalisis penerimaan pajak terhadap penerimaan pajak dalam jangka panjang maupun jangka pendek. Oleh karena itu penulis tertarik untuk meneliti lebih jauh mengenai **“Analisis Pengaruh Faktor-Faktor Makro Ekonomi Terhadap Penerimaan Pajak Di Indonesia 2015 – 2017 “**

## **B. Identifikasi Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah penulis uraikan diatas, maka yang menjadi identifikasi masalah dari penelitian ini adalah:

1. Pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijaksanaan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi. Karena untuk memutar roda pemerintahan diperlukan dana yang tidak sedikit dan pajak merupakan salah satu tumpuan pemerintah untuk memperoleh dana penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.



2. Selain itu berdasarkan penelitian-penelitian yang dilakukan di beberapa negara ketidakseimbangan ekonomi makro dan tingkat aktivitas ekonomi merupakan faktor penggerak utama elastisitas pajak atau penerimaan pajak. Analisis faktor ekonomi makro juga merupakan hal yang penting dalam menyusun dan merencanakan penerimaan pajak.
3. Selain variabel dasar pengenaan pajak, variabel kebijakan ekonomi makro juga memainkan peran penting dalam analisis penerimaan pajak. Variabel ekonomi makro, seperti Produk Domestik Bruto (pertumbuhan ekonomi) yang juga merupakan faktor tradisional, tingkat inflasi, dan nilai kurs, dinilai memiliki pengaruh terhadap penerimaan pajak.
4. Terkait dengan masalah kurs rupiah yang anjlok menjadi 14.200 pada bulan Mei 2018.

### **C. Perumusan Masalah**

Berdasarkan uraian diatas, permasalahan akan diidentifikasi bagaimanakah karakteristik perkembangan penerimaan pajak serta variabel ekonomi makro yang diperkirakan menentukan penerimaan pajak adalah sebagai berikut :

1. Apakah terdapat pengaruh secara parsial antara produk domestik bruto riil, tingkat inflasi, dan nilai tukar rupiah terhadap penerimaan pajak di Indonesia ?
2. Apakah terdapat pengaruh secara simultan antara produk domestik bruto riil, tingkat inflasi, dan nilai tukar rupiah terhadap penerimaan pajak di Indonesia?
3. Seberapa besar pengaruh antara produk domestik bruto, inflasi dan nilai tukar terhadap penerimaan pajak di Indonesia?

#### **D. Pembatasan Masalah**

Dalam menghindari peluasan subjek serta objek penelitian, maka perlu untuk dibuat suatu pembatasan masalah. Tujuannya adalah untuk membatasi arah dan peluasan yang terjadi di dalam penelitian. Oleh karena itu dalam penelitian ini peneliti membatasi variabel-variabel yang akan dijadikan objek penelitian. Untuk variabel *dependent* atau terikat adalah penerimaan pajak. Untuk variabel *independennya* adalah Produk Domestik Bruto (PDB), Inflasi, dan nilai tukar rupiah terhadap kurs dolar USD. Data yang digunakan adalah data *time series* dari tahun 2015 sampai tahun 2017 yang diambil dari situs *www.bps.go.id* dan *www.bi.go.id*

## **E. Tujuan Penelitian**

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh variabel ekonomi makro terhadap besarnya penerimaan pajak di Indonesia.

Secara khusus, tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pengaruh secara parsial antara produk domestik bruto riil, tingkat inflasi, dan nilai tukar rupiah terhadap penerimaan pajak di Indonesia.
2. Untuk mengetahui pengaruh secara simultan produk domestik bruto riil, tingkat inflasi, dan nilai tukar rupiah terhadap penerimaan pajak di Indonesia.
3. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh antara produk domestik bruto, inflasi dan nilai tukar terhadap penerimaan pajak di Indonesia.

## **F. Manfaat penelitian**

Manfaat yang akan diperoleh dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

- 1) Bagi Penulis

Dengan adanya penelitian ini banyak sekali harapan manfaat yang ingin penulis dapatkan terutama dari sudut ilmu pengetahuan mengenai pengaruh hubungan yang ditimbulkan

dari faktor makro ekonomi terhadap penerimaan pajak. Manfaat lainnya yang ingin penulis peroleh adalah kesempatan untuk membahas segala teori yang di dapatkan selama perkuliahan kedalam penelitian ini dan mampu untuk menerapkannya di dunia ekonomi bisnis dan sehari-hari.

## 2) Bagi Para Praktisi (Perusahaan/Investor) dan Lembaga Keuangan

Semoga hasil penelitian ini bisa dijadikan sebagai tolak ukur atau gambaran oleh masyarakat khususnya para praktisi (perusahaan/investor) dan lembaga keuangan dalam meninjau usaha bisnis yang akan mereka jalankan. Seperti kebijakan-kebijakan pemerintah seputar penelitian ini dan kondisi variabel makro di Indonesia.

## 3) Bagi Perguruan Tinggi

Semoga penelitian ini bisa dijadikan sebagai bahan acuan, referensi, atau bahan perbandingan penelitian yang dapat menyumbangkan pemikiran-ekonomi dan keuangan publik, khususnya mengenai teori yang terkait dengan penerimaan pemerintah dan penerimaan pajak. Penelitian ini nantinya juga diharapkan dapat menjadi salah satu referensi dan masukan dan

dapat berkontribusi dalam pengembangan dan penerapan aplikasi teori bagi penelitian selanjutnya di Jurusan Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten.

#### 4) Bagi Pemerintah

Semoga penelitian ini bisa dijadikan sebagai bahan pertimbangan bagi pemerintah pusat atau daerah dalam membuat kebijakan ekonomi yang akan diberlakukan di tingkat daerah atau nasional, seperti kebijakan-kebijakan pemerintah dalam menstabilkan tingkat inflasi, meningkatkan nilai rupiah, dan menstabilkan PDB, penelitian ini diharapkan dapat berguna dan menjadi masukan dalam penyusunan kebijakan yang terkait dengan perpajakan, khususnya kebijakan yang bertujuan untuk mengoptimalkan penerimaan pajak berimbang pada peningkatan pertumbuhan ekonomi secara nasional.

### **G. Kerangka Pemikiran**

Kerangka pemikiran merupakan suatu model konsep dari suatu teori atau pemikiran yang terangkai dalam tinjauan pustaka. Pada dasarnya kerangka pemikiran merupakan tuangan teoritis dari

tinjauan pustaka yang akan dibahas di dalam penelitian. Kerangka pemikiran dapat berupa bagan, deskriptif kualitatif, atau bahkan gabungan keduanya. Kerangka pemikiran dalam susunan penelitian akan menghasilkan suatu kerangka berpikir yang baik.

Pada teori ekonomi publik telah dijelaskan bahwa pemerintah memegang peran yang strategis dalam perekonomian. Pemerintah memiliki empat fungsi utamad dalam perekonomian suatu negara, seperti yang telah dijelaskan sebelumnya. Pemerintah juga memiliki peran dalam aliran dana pendapatan dan pengeluaran pada perekonomian.

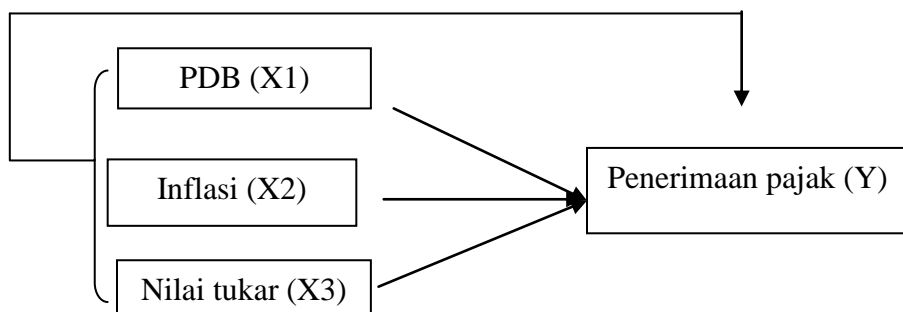
Makroekonomi merupakan bagian dari ilmu ekonomi yang mengkhususkan mempelajari mekanisme bekerjanya perekonomian sebagai suatu keseluruhan. Dengan demikian hubungan-hubungan kausal yang ingin dipelajari oleh ilmu ekonomi makro pada pokoknya ialah hubungan-hubungan antara varabel-variabel ekonomi agregatif. Diantara variabel-variabel ekonomi agregatif yang banyak dipersoalkan dalam ekonomi makro antara lain : tingkat pendapatan nasional, tingkat kesempatan kerja, pengeluaran konsumsi rumah tangga, saving, investasi nasional, jumlah uang yang

beredar, tingkat harga, tingkat bunga, neraca pembayaran internasional, stok kapital nasional, hutang pemerintah

Sebagai penyelenggara negara, pemerintah juga berfungsi menciptakan kesejahteraan rakyat melalui pembangunan. Pemerintah pula bertugas sebagai penyedia barang dan jasa yang tidak dapat disediakan oleh pasar. Dalam menyediakan barang dan jasa tersebut pemerintah memerlukan penerimaan sebagai sumber pendanaan. Sumber dana tersebut berasal dari pendapatan negara yang secara khusus dapat bersumber dari penerimaan pajak, penerimaan bukan pajak, hibah maupun pembiayaan. Penerimaan pajak merupakan sumber yang potensial dan terbesar bagi penerimaan negara. Sehingga untuk meningkatkan penerimaan negara, pemerintah perlu menyusun kebijakan dan perencanaan penerimaan pajak yang sesuai dengan kondisi perekonomian.

Pada penelitian ini analisis model penerimaan pajak dilakukan dengan menggunakan beberapa variabel ekonomi makro berupa PDB riil, tingkat inflasi, dan nilai tukar. Sehingga penerimaan pajak dapat dituliskan sebagai fungsi dari PDB, tingkat inflasi dan nilai tukar, atau dapat dituliskan:

$$TR = f(PDB, inf, ER)$$



**Gambar 1.1**  
**Kerangka pemikiran**

## H. Sistematika Penulisan

Penulisan Skripsi penelitian ini terdiri dari lima bagian diantaranya:

### **Bab I : Pendahuluan**

Merupakan yang menjelaskan latar belakang permasalahan, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, serta sistematika penulisan. Pada bab ini juga dijelaskan kondisi sumber-sumber penerimaan negara, dan permasalahan yang terkait dengan penerimaan pajak.

### **Bab II : Tinjauan Pustaka**

Merupakan bagian yang terdiri dari landasan teori, tinjauan pustaka, kerangka pemikiran, dan hipotesis penelitian. Landasan teori dimulai dengan pemaparan peran dan fungsi sektor publik atau peran pemerintah dalam perekonomian. Penjelasan selanjutnya terkait dengan pajak sebagai sumber utama penerimaan pemerintah,



dimana pada sub bagian tersebut dijelaskan juga struktur tarif pajak. Selain itu juga dijelaskan bagaimana variabel-variabel ekonomi makro dapat mempengaruhi penerimaan pajak. Pada bab ini juga dicantumkan penelitian-penelitian terdahulu di beberapa negara yang terkait dengan penelitian yang dilakukan, serta hipotesis penelitian.

### **Bab III : Metodologi Penelitian**

Pada bab ketiga akan dijelaskan tentang metodologi penelitian yang digunakan berdasarkan pokok masalah utama untuk mencapai hasil dan tujuan yang diinginkan. Pada bab ini peneliti akan menguraikan tentang tempat dan waktu penelitian, metode penelitian, populasi dan sampel, instrumen penelitian, teknik analisis data, dan hipotesis statistik.

### **Bab IV : Deskripsi Hasil Penelitian**

Pada bab ini dianalisis perkembangan data penerimaan pajak, serta variabel independen lainnya sejak tahun 2008 hingga tahun 2016. Pada bab ini juga dicantumkan hasil estimasi pada model yang telah dibangun dan analisis hasil estimasi tersebut dan deskripsi hasil penelitian yang akan menjelaskan tentang hasil analisis dari pengolahan data yang telah dilakukan meliputi deskripsi data, uji

persyaratan analisis, pengujian hipotesis, dan pembahasan hasil penelitian.

### **Bab V : Penutup**

Pada bab kelima akan memuat hasil kesimpulan dari penelitian yang telah dilakukan berdasarkan analisis data yang telah diolah dan telah dibahas pada bagian sebelumnya dan memberikan saran yang dapat digunakan sebagai pertimbangan dalam penelitian selanjutnya dan pertimbangan bagi pihak pihak yang terkait seperti pemerintah dan para praktisi ekonomi atau lembaga keuangan.